

BAB VI PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan sistem informasi akuntansi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB) pada Kantor Samsat sudah dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap, dan Permendagri Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor.
2. Hal ini ditandai dengan struktur organisasi yang jelas pada Kantor Samsat sehingga tugas pokok masing-masing dari setiap bagiannya jelas dan terarah, dan adanya pemisahan fungsi dan tanggung jawab yang jelas dalam setiap bagian sehingga tujuan Kantor Samsat Kota Kupang dapat tercapai.
3. Adapun kendala yang biasa terjadi dilapangan disebabkan oleh adanya berkas persyaratan yang hilang serta pemohon balik nama yang kurang mengetahui apa saja syarat yang di perlukan dalam proses pengurusan balik nama baik itu STNK maupun BPKB dan adanya beberapa kesalahan teknis pada kantor Samsat Kota Kupang yang mana hal

tersebut dapat menyebabkan waktu yang ditentukan untuk proses balik nama tidak sesuai dengan waktu berdasarkan pada peraturan yang telah ditetapkan.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka saran yang dapat diberikan peneliti adalah sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Samsat Kota Kupang agar bisa meningkatkan kualitas pelayanannya, yakni dengan cara melakukan sosialisasi kepada masyarakat secara menyeluruh terhadap pentingnya melakukan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor serta menjaga semua berkas berkaitan dengan balik nama agar ketika proses pengurusannya kembali tidak terkendala, dan bisa mengatasi hambatan- hambatan yang biasa terjadi pada saat menginput data.
2. Bagi pihak yang akan melakukan balik nama kendaraan bermotor agar memperhatikan setiap berkas ataupun persyaratan yang dibutuhkan dalam proses balik nama terutama bagi pemohon yang berkasnya hilang sehingga tidak menghambat ataupun menjadi kendala jalannya proses pemungutan BBN-KB.
3. Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi bahan referensi untuk penelitian selanjutnya dan memperluas ruang lingkup dari penelitian ini dengan menambahkan beberapa variabel yang berkaitan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bodnar, George H. Willaim S. Hopwood. 2000. *Accounting Information System*. Dialih bahasakan oleh Amir Abadi Jusuf, Rudi M. Tambunan. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat
- Kieso, Donald. 2007. *Akuntansi Intermediate*. Edisi kedua belas. Jilid 1. Jakarta: Erlangga
- Lestari, Andi Elsa. 2017. *Evaluasi Penerapan Sistem dan Prosedur Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (studi pada kantor Samsat Kota Kendari)*. Skripsi Akuntansi, Universitas Halu Oleo Kendari.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta
- Midjan La, Susanto Azhar. 2003. *Sistem Informasi Akuntansi II, Praktik Penyusunan, Metoda dan Prosedur*. Bandung: Lingga Jaya
- Mulyadi. 2001. *Sistem Akuntansi, edisi ketiga*. Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Daerah. *Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah*.
- Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Regident Ranmor.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri. *Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Pemerintah. *Nomor 60 Tahun 2016 tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kepolisian nergara Republik Indonesia*.
- Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap Kendaraan Bermotor
- Saputra, Pashorio. 2012. *Analisis Administrasi Pemungutan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (Studi Kasus terhadap Mekanisme Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru pada Samsat Serpong)*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi. Universitas Bina Nusantara. Jakarta Barat
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perpajakan*
- Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

Waluyo. 2010. *Perpajakan Indonesia, Edisi 9*. Jakarta: Salemba Empat

Widanarko, Aris. 2010. *Kualitas Pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada Kantor Samsat Kota Surakarta (Studi pada Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor)*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi. Universitas Sebelas Maret. Surakarta

Widjajanto, Nugroho. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi*. Jakarta: Erlangga

Wowoling, Susana Sintia. 2015. *Analisis Prosedur dan Perhitungan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Sulawesi Utara*. Skripsi pada Fakultas Ekonomi. Universitas Sam Ratulangi. M